

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Pendra Eka Putra

Pembimbing Dadang Mashur, S.Sos., M.Si

Pendraekaputra21@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRACT

Based on the background of the phenomenon that occurred in the field is still a lack of development that occurred in the Village District Tanjung Koto Kampar such as the construction of post ronda which until now not ready to build, and semenisasi unfinished roads, public services provided by the village government is still not satisfied According to society and society still not prosperous because society still feel difficult emndapatkan service from government which exist in Desa Tanjung Subdistrict Koto Kampar. The formulation of the problem in this research is how the Village Fund Allocation Management (ADD) in the Village of Tanjung Koto Kampar Hulu Sub-district of Kampar District and the factors that influence the Village Fund Allocation Management (ADD) in the Village of Tanjung Koto Kampar Hulu Subdistrict, Kampar regency. The type used in this research is qualitative with descriptive survey technique. The location of this research was conducted in Desa Tanjung Koto Kampar Hulu sub-district, Kampar regency. The informant is the Head of Tanjung Village, the Secretary of Tanjung Village Head, and the community. The results of the implementation of Village Fund Allocation (ADD) management in the physical development of the Tanjung Village can be seen from the results of the research interviews, that the management carried out is in accordance with the planning discussed, but the problem is the lack of supervision by the village government to the people who commit the fraud so that Hampering the management of Village Fund Allocation (ADD) in the physical development of Desa Tanjung. And the factors affecting the management of Tanjung's village funding allocations are that the lack of finances owned by Tanjung villages is exacerbated by the sluggish assistance from local governments in providing village allocation funds, the lack of village community participation in village development that is part of village financial management makes it even more difficult for successful financial management, Supporting factors and constraints to village financial management are on the internal and external side of the village organization. These factors greatly affect the performance of Tanjung village's financial management while the inhibiting factor of village financial management is the limited availability of funds so that managers the difficulty of determining which programs should be precedence.

Keywords: Management, Allocation of Village Funds.

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di era globalisasi, pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar terlaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam UU nomor 23 Tahun 2014 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak tergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down).

Pengelolaan merupakan pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem

pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, harus menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi juga diperlukan untuk pembinaan lebih lanjut, karena semuanya harus sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat

berasal dari berbagai sumber seperti dari Permerintahan, swasta maupun masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam PP 72/2005 tentang Desa, dalam PP ini juga mengatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa yang berbentuk hibah ataupun donasi.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa adalah perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan.

Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan form yang telah ditetapkan, disamping

itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitas Kecamatan.

Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Dalam Peraturan Bupati Kampar No 10 tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Untuk Desa Di Kabupaten Kampar pada pasal 2 menjelaskan maksud dan tujuan ADD adalah:

1. Maksud diberikannya Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Tujuan diberikannya Dana Desa, ADD, Bagian Hasil Pajak, dan Bagian Hasil Retribusi adalah :
 - a. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab;
 - b. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
 - c. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
 - d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat

- desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama
- e. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.

Penggunaan alokasi dana Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar dapat diketahui bahwa jumlah Alokasi Dana Desa Tanjung sebesar Rp. 603.306.000 telah digunakan ataupun dipakai untuk pembangunan dan biaya lainnya. Akan tetapi masih ada biaya ataupun operasional yang tidak seharusnya ataupun tidak perlu dikeluarkan tetapi tetap juga dikeluarkan juga seperti alat operasinal kantor seperti kursi atau bangku, padahal tahun kemarin sudah juga dilakukan pembelian operasional tersebut.

Adapun jumlah Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Untuk Operasional Kantor Desa Tanjung Tahun 2015 yaitu; untuk Alat Tulis Kantor Rp.4.881.000, untuk Benda Pos Rp. 204.000, untuk Pakaian Dinas Rp.3.500.000, untuk Alat dan Bahan Kebersihan Rp. 812.000, untuk Perjalanan Dinas Rp.15.600.000, untuk Pemeliharaan Rp. 1.400.000, untuk Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp. 234.000, untuk Surat Kabar dan Majalah Rp. 3.600.000, untuk Belanja Rekening Listrik Rp. 1.440.000, untuk Belanja Cetak Dan Pengadaan Rp.2.270.000, untuk Honor RP.16.450.000 semuanya itu di

jumlahkan didapat sebesar Rp. 50.391.000.

Kendati demikian, alokasi dana desa (ADD) yang diberikan biasanya sudah menjadi tradisi para aktor-aktor antagonis dalam pemerintahan tersebut untuk menyalahgunakan dana yang di suplay dari pemerintah tersebut, adanya oknum-oknum aparat desa yang dengan sengaja mengalokasikan dana desa tidak sebagaimana mestinya. Sebagai gambaran fenomena yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan maksud diberikannya dana desa ataupun ADD salah satunya adalah untuk pelaksanaan pembangunan Desa, akan tetapi masih kurangnya pembangunan yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar seperti pembangunan pos ronda yang sampai sekarang belum siap di bangun, dan semenisasi jalan yang masih belum selesai.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No 10 tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, alokasi dana desa diberikan untuk tujuan salah satunya; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, akan tetapi pelayanan kemasyarakat yang diberikan pihak pemerintah desa masih belum puas menurut masyarakat dan masyarakat masih belum sejahtera karena masyarakat masih merasa susah emndapatkan pelayanan dari pemerintah yang

ada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi pemerintah desa untuk mengelola alokasi dana desa yang lebih baik di desa Tanjung Kecamatan Koto

Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

- b. Sebagai Bahan informasi atau pedoman bagi pemerintah Desa Tanjung dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- c. Hasil Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pebgetahuan bagi pihak yang memerlukan.
- d. Penelitian ini berguna bagi peniliti berikutnya yang mau mengadakan penelitian yang sama.

D. Tinjauan Teoritis

1. Manajemen

Menurut Usman (2013:5) Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan dan agree (melakukan). Kata-kata itu digabung menjadi managere yang artinya menangani. Manager diterjemahkan kebaaha inggris to manage (kata kerja), management (kata benda), dan manager untuk orang yang melakukannya. Management diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan).

Menurut Sastrohadiwiryo (2009:7) mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses keiatan pencapaian tujuan dengan

menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

Terry (2006:4) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Daft (2010:6) manajemen diartikan oleh ahli manajemen awal abad kedupuluh Mery Parker Follet mendefenisikan manajemen sebagai seni yang menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Yohannes (2006:2) sebagai seni, manajemen adalah manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan lebih bermanfaat. Praktek manajemen seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip teori. Manajemen bukan hanya sebagai ilmu dan seni, tetapi merupakan kombinasi keduanya.

Menurut Stoner (dalam Sinn, 2013:29) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan megawasi usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Plunket (2005:5) mendefisikan manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai

tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staff, pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya (Informasi, material, uang dan orang).

Stephen (2004:5) manajemen adalah proses mengelola dan mengkoordinasi sumber daya secara efektif dan efisien sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Mary Parker Follet (dalam Handoko 2008:8) Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer-manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.

Dharma (2009: 1) manajemen adalah suatu proses yang terancang untuk peningkatan suatu organisasi, kolompok, individu yang akan digerakkan oleh seorang manajer. Dan juga manajemen merupakan proses yagn dilaksanakan secara sinergi antara manajer, individu dan kelompok terhadap suatu pekerjaan di dalam organisasi.

Manajemen merupakan suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang lain Winardi, (2007:4) manajemen pada dasarnya bekerja melalui siklus produksi yang terus menerus maupun proyek yang merupakan pekerjaan sekali jadi. Selanjutnya Alma (2008:131) menyatakan bahwa manajemen sebagai suatu kegiatan planning, organizing, staffing, coordinating, dan controlling pekerjaan orang lain untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Kesuksesan

setiap perusahaan akan sangat tergantung pada manajemen yang efektif dan efisien, para manajer bertanggung jawab dalam mengembangkan strategi dan rencana taktis serta menganalisa lingkungan persaingan dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari setiap kegiatan operasional sehari-hari untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen diartikan sebagai yang menjalankan usaha tentu telah melaksanakan serangkaian kegiatan merencanakan, melaksanakan dan menilai keberhasilan dan kegagalan usahanya. Disadari atau tidak mereka telah menempuh proses manajemen (Suhardan, Dkk, 2013:85).

Manajemen dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa tidak ada organisasi yang bergerak dalam keadaan terilosasi. Artinya tidak ada organisasi yang boleh mengambil sikap tidak peduli terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan dimana ia bergerak (Siagan, 2010:35).

Menurut Sutrisno (2014: 6) manajemen merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Walaupun objeknya sama-sama manusia, namun pada hakikatnya ada perbedaan yang hakiki.

Manajemen untuk era saat ini sangat diperlukan untuk mengorganisir, mengatur, merencanakan, serta mengontrol suatu instansi/perusahaan/organisasi, dengan tujuan agar tercapai cita-cita dari

instansi / perusahaan / organisasi tersebut. Peranan penting manajemen karena manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan harapan yang ditetapkan perusahaan (Hasibuan, 2012:2).

Menurut Sastrohadiwiryo (2009:131) menyatakan bahwa manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang di sistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Veithzal Rivai, 2006:6).

Menurut Glover dalam Alma (2008:139) mendefinisikan manajemen sebagai bentuk kepandaian manusia dalam menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Richard L. Daft (2007:3) menyatakan bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi.

Menurut Hasibuan (2012:23), mengatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a. Perencanaan.

- b. Pengorganisasian.
- c. Pengarahan.
- d. Pengawasan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan tentang proses untuk memperoleh tujuan organisasi melalui upaya bersama dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi.

2. Keuangan Negara dan Daerah

Keuangan negara pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Sementara keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing. Saidi (2008: 2-3).

Pada dasarnya, pemerintahan negara melibatkan usaha-usaha yang disebut sebagai pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara dapat dipahami sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang secara eksplisit disebut sebagai ruang lingkup pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka menciptakan suatu pengelolaan keuangan negara yang baik tentu berdasarkan pada asas-asas hukum yang mendasarinya. Tujuannya ialah menciptakan suatu bingkai kerja untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas pengelolaan keuangan negara dalam konteks kehidupan bernegara di

Indonesia mengalami perkembangan apabila menjadikan undang-undang keuangan negara sebagai batu pijakan. Sebelum UUKN berlaku terdapat beberapa asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan diakui kekuatan berlakunya dalam pengelolaan keuangan negara selanjutnya. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara yang dimaksud adalah:

- a. Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran;
- b. Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran;
- c. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu; dan
- d. Asas spesialisasi, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Saidi (2008: 16).

3. Alokasi Dana Desa

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya adanya

kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

Menurut Sahdan (2004:10) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif-administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari pemerintah.

Menurut HAW Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dana APBD masing masing sebesar 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Hanif Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana

yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian alokasi dana desa tersebut merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara Penggunaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian: kita harus menggalakkan bahasa Indonesia, dengan demikian penggunaan merupakan salah satu perbuatan seseorang dalam menggunakan ataupun mengelola sesuatu baik barang maupun jasa. Mengacu pada definisi tersebut penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna ADD (pemerintah desa) dalam mengelola dan menata usahakan Alokasi dana desa (ADD) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Penggunaan ADD harus gunakan secara efektif dan efisien.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2003:19) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral.

Menurut Husaini dan Purnomo, (2009:130) pendekatan diskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan katakata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatar belakangi.

Oleh karena itu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 05 Januari 2017 sampai 17 Mei Tahun 2017. Alasannya penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu karena wilayah di Kelurahan ini merupakan daerah yang belum pesat perkembangannya di Kecamatan Koto Kampar Hulu yang mana lokasi terdapat hal menarik untuk dijadikan objek penelitian karena kurangnya pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan studi penelitian lapangan dan jenis data yang

dipakai penulis sebagai pedoman adalah:

- a. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

4. Informan Penelitian

Informan adalah kelompok responden yang memiliki pengetahuan, memahami dan lebih berpengalaman mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan sampel purposive.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:131). sampel purposive ialah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.

Di dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipilih orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang menjadi key Informan adalah Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, sedangkan yang menjadi informan pelengkap adalah yang bersinggungan langsung tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Dalam kegiatan wawancara mendalam (indepth interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (key informan) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena terhadap obyek yang sedang diamati.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan. Kemudian data dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan cara menggambarkan secara utuh dan nyata dari hasil penelitian dilapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lain sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yaitu:

1. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Tanjung dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan, namun kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yang melakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Tanjung.
2. Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa Tanjung yaitu, Tidak adanya kompensasi dari aparat pemerintahan Desa Tanjung untuk para bawahannya dalam

pengelolaan dan merencanakan Alokasi Dana Desa, terlihat dari banyaknya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanjung sehingga banyak dari perencanaan yang tidak terlaksana yang disebabkan bawahannya yang sering tidak mendapatkan kompensasi dari atasannya. Kurangnya kedisiplinan pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ingin melaksanakan semua perencanaan yang telah ada sedangkan alokasi dana desa terbatas. Tidak adanya motivasi dari pemerintah desa terhadap para bawahannya ataupun pegawainya yang melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sehingga banyak dari pengelola yang tidak semangat dalam melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa tersebut seperti pengawasan yang kurang dilaksanakan dengan baik dilapangan sehingga membuat banyak dari pembangunan yang terbangkalai dan pengelolaan keuangan yang dilakuakn tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Disarankan kepada Tim pengelola ADD desa Tanjung agar menghitung dan mengukur dalam menggunakan alokasi dana

- desa untuk hal yang sangat esensial dan sesuai perencanaan pembangunan infrastruktur desa yang sangat dibutuhkan masyarakat desa dan pemerintah ataupun masyarakat agar selalu mengawasi dan tidak terjadinya kucurangan dari pengelola alokasi dana desa.
2. Disarankan kepada Pemerintah Desa Tanjung agar lebih peka terhadap faktor penghambat pengelolaan keuangan agar mampu mengantisipasi kendala-kendala pengelolaan keuangan desa seperti kompensasi yang dibutuhkan bagi pengelola dan pegawai lainnya yang berperan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, kemudian kedisiplinan dari seluruh aparat pemerintah dalam mengalokasikan dana desa. Dan berikan motivasi bagi pengelola yang melaksanakan alokasi dana desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. 2013. *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Wali.
- Buchari Alma. 2008. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung. Alfabeta.
- Dadang Suhardan Nugraha Suahrto. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Danang Sunyoto. 2013. *Teori, Kuesioner, dan Analisis Data Sumber Daya Manusia. (Praktik Penelitian)*. Jakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service).
- Edy Sutrisno. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- George R. Terry. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen*. PT. Bumi Aksara
- Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. UGM Press. Yogyakarta.
- Husaini Usman. 2013. *Manajemen; Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irham Fahmi. 2011. *Manajemen Resiko; Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Mahfud MD. 2001. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara

- Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Plunket, dkk. 2005. *Management : Meeting and Exceeding Customer Expectations*. USA : Thomson South – Western.
- Richard L. Daft. 2010. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Selemba Empat.
- Richarl L. Daft. 2010. *Era Baru Manajemen New Era Of Management*. Jakarta. Salemba Empat.
- Siswanto Sastrohadiwiryono. 2009. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*. PT Bumi aksara: Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Surya Dharma. 2009. *Manajemen Kinerja: Falsafah Teori Dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- T. Hani Handoko. 2008. *Manajemen Edisi 2* Yogyakarta. BPFE.
- Veithzal Rivai. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wilson Bangun. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Winardi. 2004. *Motivasi Pemoivasiian Dalam Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Yahya Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. BPFE. Yogyakarta

Dokumentasi

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Untuk Desa Di Kabupaten Kampar